

TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENAMBANG EMAS DI DESA KUSUBIBI, KECAMATAN BACAN BARAT, HALMAHERA SELATAN

**Bambang Irawan¹, Ramdhani Salam^{2*}, Vrita Tri Aryuni³, Yadi Rahmat⁴, Vita Sari Ansar⁵,
Karlina N Hehanusa⁶, Anand Budiono⁷**

^{1,4,5,6,7}Mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Khairun

^{2,3}Dosen Prodi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Khairun

*Email: vrita@unkhair.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat penambang emas di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada 23 Februari sampai 9 Maret 2023 dengan jumlah responden sebanyak 70 orang yang terlibat dalam aktivitas pertambangan emas. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan distribusi frekuensi, persentase, dan penskoran berdasarkan delapan indikator kesejahteraan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan memperoleh fasilitas transportasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat penambang emas di Desa Kusubibi didominasi kategori sedang. Dari 70 responden, sebanyak 58 responden (82,8%) berada pada kategori kesejahteraan sedang dan 12 responden (17,2%) berada pada kategori rendah, sedangkan kategori tinggi tidak ditemukan. Pada tingkat indikator, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga didominasi kategori sedang, kondisi tempat tinggal sebagian besar semi permanen, kesehatan anggota keluarga didominasi kategori rendah, sedangkan kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan berada pada kategori tinggi. Akses terhadap fasilitas transportasi masih menjadi salah satu aspek dengan kondisi rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pendidikan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya diikuti peningkatan pada aspek kesehatan, kualitas tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Kata kunci: Kesejahteraan masyarakat; Penambangan emas; Rumah tangga; Pertambangan.

ABSTRACT. This study aims to analyze the welfare level of gold-mining communities in Kusubibi Village, West Bacan District, South Halmahera Regency. The study employed a quantitative approach with a descriptive design. It was conducted from February 23 to March 9, 2023, involving 70 respondents engaged in gold-mining activities. Data were collected through questionnaires, interviews, and observations, and were analyzed using frequency distributions, percentages, and a scoring method based on eight welfare indicators: income, household consumption or expenditure, housing conditions, housing facilities, family health, access to health services, access to education for children, and access to transportation facilities. The results showed that the welfare level of the gold-mining community in Kusubibi Village was predominantly in the moderate category. Of the 70 respondents, 58 (82.8%) were classified as having a moderate level of welfare, while 12 (17.2%) were classified as having a low level of welfare; no respondents were classified as having a high level of welfare. At the indicator level, income and household expenditure were predominantly in the moderate category, most housing conditions were semi-permanent, and family health was predominantly in the low category, whereas access to education for children was in the high category. Access to transportation facilities remained one of the aspects with relatively low conditions. The findings indicate that gold-mining activities contribute to meeting the economic and educational needs of the community, but these contributions have not been fully accompanied by improvements in health, housing quality, and accessibility.

Keywords: Community welfare; Gold mining; Household; Mining activities

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral yang tersebar di berbagai wilayah. Sumber daya mineral seperti emas, nikel, tembaga, dan batubara memiliki nilai ekonomi serta menjadi bagian penting dalam aktivitas pembangunan. Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan regulasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya mineral, tetapi juga dengan tata kelola, pengawasan, lingkungan, dan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan (Taqiyaah & Hidayat, 2023). Dengan demikian, keberadaan kegiatan pertambangan perlu dilihat tidak hanya dari kontribusinya terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pertambangan emas skala kecil menjadi salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang berkembang di sejumlah wilayah pedesaan Indonesia. Bagi sebagian masyarakat pedesaan, kegiatan pertambangan emas menjadi alternatif mata pencaharian ketika kesempatan kerja di sektor formal maupun produktivitas sektor pertanian terbatas. Penelitian mengenai masyarakat di wilayah pertambangan emas skala kecil di Gorontalo menunjukkan bahwa sumber pendapatan rumah tangga berasal dari berbagai aktivitas, dengan

pertambangan menjadi salah satu sumber pendapatan penting selain pertanian dan pekerjaan lainnya (Sihombing et al., 2020). Kajian mengenai pertambangan emas skala kecil di Indonesia juga menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dapat menjadi sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan, termasuk bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan (Sulaiman et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertambangan emas bagi masyarakat lokal tidak semata-mata merupakan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menjadi bagian dari strategi penghidupan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Namun, kontribusi pertambangan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Kesejahteraan rumah tangga merupakan kondisi yang bersifat multidimensional dan dapat dilihat melalui berbagai aspek, antara lain pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, kondisi perumahan dan lingkungan, serta aspek sosial lainnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Oleh karena itu, peningkatan pendapatan akibat kegiatan pertambangan perlu dilihat bersama dengan kondisi kehidupan rumah tangga lainnya. Penelitian mengenai pertambangan emas tanpa izin di Jambi, misalnya, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan yang dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga (Junaidi, 2022). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pertambangan dan kesejahteraan masyarakat bersifat kompleks sehingga tidak cukup dinilai hanya berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pertambangan.

Kondisi Provinsi Maluku Utara yang memiliki sumber daya mineral dan

aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah. Bagi masyarakat di wilayah pedesaan, perubahan struktur mata pencaharian dapat terjadi ketika muncul kegiatan ekonomi baru yang dianggap memberikan peluang pendapatan lebih besar. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara menggunakan beberapa dimensi untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat, meliputi kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kondisi sosial lainnya (BPS Provinsi Maluku Utara, 2022; 2023). Dengan demikian, kondisi kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan perlu dipahami melalui karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan bukan hanya melalui keberadaan sumber daya mineral atau meningkatnya aktivitas ekonomi. Pada tingkat lokal, Kecamatan Bacan Barat merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pedesaan (BPS Kabupaten Halmahera Selatan, 2023).

Salah satu wilayah yang memiliki aktivitas penambangan emas adalah Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan observasi awal peneliti pada 8 Oktober 2022, aktivitas pertambangan emas di Desa Kusubibi telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Sebelum berkembangnya kegiatan pertambangan, sebagian masyarakat Desa Kusubibi menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian dan perikanan. Hasil wawancara awal dengan salah seorang penambang menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat sebelum adanya aktivitas pertambangan relatif rendah dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Informan menyampaikan bahwa pendapatan dari kegiatan pertanian,

khususnya hasil perkebunan, pada periode tertentu berkisar Rp500.000 per bulan apabila dihitung berdasarkan penerimaan bulanan, sedangkan hasil panen yang diperoleh dalam periode tertentu dapat mencapai sekitar Rp2.000.000. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat memanfaatkan aktivitas pertambangan sebagai alternatif sumber pendapatan. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian tentang komunitas pertambangan emas skala kecil di Indonesia, di mana keterbatasan kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan dari sektor pertanian menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas pertambangan (Sihombing et al., 2020).

Meskipun memberikan peluang ekonomi, aktivitas penambangan emas di Desa Kusubibi juga memiliki persoalan dari sisi legalitas karena kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat tidak seluruhnya berada dalam kerangka perizinan pertambangan yang ditetapkan pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa pertambangan tanpa izin (PETI) berbeda dengan pertambangan rakyat yang memiliki dasar perizinan dan tata kelola yang diatur pemerintah (Kementerian ESDM, 2021). Persoalan legalitas tersebut penting diperhatikan karena aktivitas pertambangan tanpa izin dapat berkaitan dengan persoalan tata kelola, keselamatan kerja, dan lingkungan. Pada sisi lain, penelitian mengenai masyarakat pertambangan emas di Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi berupa kesempatan kerja dan sumber pendapatan, tetapi juga dapat menghasilkan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan (Libassi, 2020; Junaidi, 2022). Dengan demikian, terdapat kondisi yang menarik untuk dikaji di Desa Kusubibi, yaitu di satu sisi pertambangan emas dipandang masyarakat sebagai

sumber mata pencaharian yang dapat meningkatkan pendapatan, tetapi di sisi lain belum dapat dipastikan bahwa peningkatan pendapatan tersebut secara otomatis menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang lebih baik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara pertambangan emas, pendapatan, mata pencaharian, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Astuti et al. (2016), misalnya, menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas penambangan emas tanpa izin dengan kondisi kesejahteraan rumah tangga yang dilihat dari kondisi tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan pengeluaran rumah tangga. Penelitian Junaidi (2022) juga menunjukkan bahwa pertambangan emas tanpa izin dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan sosial dan lingkungan yang perlu ditangani. Sementara itu, penelitian Aryansyah et al. (2023) di Dompu menunjukkan bahwa pertambangan emas tradisional memberikan dampak ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, tetapi juga menimbulkan persoalan lingkungan. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat penambang emas di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat penambang emas berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat penambang emas di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pertambangan emas di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data penelitian diperoleh melalui pengukuran indikator kesejahteraan yang kemudian dianalisis menggunakan skor, distribusi frekuensi, dan persentase. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi responden berdasarkan data hasil pengukuran (Sugiyono, 2018). Penelitian dilaksanakan pada 23 Februari sampai 9 Maret 2023. Desa Kusubibi dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan emas yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat.

Populasi penelitian berjumlah 241 kepala keluarga (KK) yang menjadi dasar penentuan sampel penelitian. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 70 responden. Responden dipilih dari masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi pertambangan emas dan dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu pekerja tromol sebanyak 13 responden, pekerja rempe sebanyak 10 responden, pedagang/kios sebanyak 11 responden, penggali lubang sebanyak 12 responden, kijing atau buruh sebanyak 14 responden, dan penyedia lubang sebanyak 10 responden. Pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pertambangan emas di Desa Kusubibi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan delapan indikator operasional yang diadaptasi dari kerangka indikator kesejahteraan Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan

tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, kemudahan menyekolahkan anak, dan kemudahan memperoleh fasilitas transportasi. Penggunaan beberapa dimensi tersebut didasarkan pada konsep bahwa kesejahteraan masyarakat bersifat multidimensional dan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi kesehatan, pendidikan, konsumsi, perumahan, dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2023). Delapan indikator tersebut selanjutnya dioperasionalkan dalam instrumen penelitian dan masing-masing diberi skor 1–3. Skor 3 menunjukkan kondisi tinggi atau baik, skor 2 menunjukkan kondisi sedang atau cukup, sedangkan skor 1 menunjukkan kondisi rendah atau kurang. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap masyarakat penambang emas. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai pendapatan, pengeluaran rumah tangga, keadaan dan fasilitas tempat tinggal, kesehatan keluarga, akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan anak, serta akses terhadap fasilitas transportasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang mendukung data kuantitatif, sedangkan observasi digunakan untuk mengamati kondisi sosial ekonomi dan tempat tinggal responden. Data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah desa, Badan Pusat Statistik, dan sumber lain yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui distribusi frekuensi, persentase, dan penskoran terhadap delapan indikator kesejahteraan. Persentase setiap kategori dihitung menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan: (P) adalah persentase, (F) adalah frekuensi responden pada kategori tertentu, dan (N) adalah jumlah seluruh responden. Selanjutnya, skor dari delapan indikator dijumlahkan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masing-masing responden. Setiap indikator memiliki skor minimum 1 dan maksimum 3, sehingga skor total berada pada rentang 8–24. Penentuan kelas kesejahteraan dilakukan dengan membagi rentang skor menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan perhitungan interval kelas, tingkat kesejahteraan dikategorikan menjadi skor 8–13 sebagai tingkat kesejahteraan rendah, skor 14–19 sebagai tingkat kesejahteraan sedang, dan skor 20–24 sebagai tingkat kesejahteraan tinggi. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat penambang emas di Desa Kusubibi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat penambang emas di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan delapan indikator, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan memperoleh fasilitas transportasi. Penggunaan beberapa indikator tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara multidimensional, karena kondisi kesejahteraan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga dengan kemampuan memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan aksesibilitas. Pendekatan tersebut sejalan dengan indikator kesejahteraan rakyat yang

digunakan BPS yang mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kondisi sosial lainnya (BPS, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat penambang emas di Desa Kusubibi berbeda pada setiap indikator. Pada indikator pendapatan, sebagian besar responden berada pada kategori sedang (64,2%), diikuti kategori tinggi (18,7%) dan rendah (17,1%). Pada indikator konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, kategori sedang juga mendominasi sebesar 57,1%, sedangkan kategori tinggi sebesar 25,7% dan rendah sebesar 17,1%. Kondisi tempat tinggal didominasi kategori semi permanen sebesar 90%, sedangkan rumah permanen sebesar 10%. Pada fasilitas tempat tinggal, 94,2% responden berada pada kategori sedang dan 5,7% pada kategori rendah. Kondisi kesehatan anggota keluarga menunjukkan 90% berada pada kategori rendah dan 10% pada kategori sedang. Sementara itu, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan seluruhnya berada pada kategori sedang (100%), sedangkan kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan seluruh responden berada pada kategori tinggi (100%). Pada indikator fasilitas transportasi, sebagian besar responden berada pada kategori rendah, yaitu 77,1%, sedangkan kategori sedang sebesar 15,7% dan tinggi sebesar 7,1%.

Tabel 3. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Penambang Berdasarkan Indikator

Indikator	Tinggi (%)	Sedang (%)	Rendah (%)
Pendapatan	18,7	64,2	17,1
Konsumsi/pengeluaran rumah tangga	25,7	57,1	17,1
Keadaan tempat tinggal	10	90	—
Fasilitas tempat tinggal	—	94,2	5,7

Kesehatan anggota keluarga	—	10	90
Kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan	—	100	—
Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	100	—	—
Kemudahan memperoleh fasilitas transportasi	7,1	15,7	77,1

Sumber: Data primer, 2023.

Berdasarkan Tabel 3, indikator ekonomi menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa indikator sosial dan aksesibilitas. Pendapatan masyarakat penambang didominasi kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi masyarakat Desa Kusubibi, tetapi tingkat pendapatan yang diperoleh berbeda menurut jenis pekerjaan. Responden yang bekerja sebagai pemilik lubang dan pedagang/kios memiliki peluang memperoleh pendapatan lebih tinggi, sedangkan pekerja rempe dan pekerja tromol lokal cenderung memperoleh pendapatan lebih rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan tidak diterima secara seragam oleh seluruh masyarakat yang terlibat. Perbedaan posisi dalam kegiatan pertambangan menyebabkan perbedaan kemampuan memperoleh pendapatan. Temuan ini sejalan dengan kajian mengenai pertambangan emas skala kecil di Indonesia yang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan menjadi salah satu sumber mata pencaharian dan pendapatan masyarakat pedesaan, tetapi manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat berbeda sesuai dengan bentuk keterlibatan mereka dalam kegiatan pertambangan. Selain memberikan peluang ekonomi, pertambangan emas skala kecil juga

memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan yang perlu diperhatikan.

Pada indikator konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, sebagian besar responden berada pada kategori sedang, yaitu 57,1%. Sebanyak 25,7% berada pada kategori tinggi dan 17,1% pada kategori rendah. Pengeluaran rumah tangga tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pangan, tetapi juga untuk kebutuhan nonpangan seperti pakaian, perbaikan atau pembangunan rumah, perabot rumah tangga, serta biaya pendidikan anak. Pengeluaran yang cukup besar juga terjadi ketika anak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa besarnya pendapatan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran kesejahteraan. Pendapatan yang diperoleh rumah tangga harus dilihat bersama dengan pola pengeluaran dan jumlah kebutuhan keluarga. Dalam konteks masyarakat penambang, pendapatan dapat meningkat ketika kegiatan pertambangan memberikan hasil yang baik, tetapi kebutuhan rumah tangga juga meningkat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Junaidi (2022) yang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin dapat memberikan peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat, tetapi peningkatan manfaat ekonomi tersebut berlangsung bersamaan dengan persoalan sosial dan lingkungan yang dapat memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tempat tinggal menunjukkan bahwa 90% responden memiliki rumah semi permanen dan hanya 10% memiliki rumah permanen. Dominannya rumah semi permanen menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga belum memiliki kondisi bangunan rumah yang sepenuhnya permanen. Kondisi tersebut terlihat dari penggunaan kombinasi bahan bangunan seperti tembok atau bata tanpa plester dan kayu dengan kualitas yang lebih rendah.

Sementara itu, fasilitas tempat tinggal menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik. Sebanyak 94,2% responden berada pada kategori sedang dan 5,7% pada kategori rendah. Sebagian responden telah memiliki televisi, lemari es, sumber penerangan listrik, kendaraan bermotor, serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus. Namun, keterbatasan luas pekarangan, kondisi permukiman yang berhimpitan, serta keterbatasan sumber air bersih masih menjadi bagian dari kondisi kehidupan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kemampuan rumah tangga memiliki fasilitas tertentu dengan kualitas kondisi tempat tinggal secara keseluruhan. Artinya, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pertambangan dapat digunakan untuk memperoleh barang dan fasilitas rumah tangga, tetapi belum seluruhnya mampu meningkatkan kualitas bangunan rumah. Hal tersebut sesuai dengan konsep kesejahteraan BPS yang menempatkan kondisi perumahan dan lingkungan sebagai salah satu dimensi penting dalam menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat (BPS, 2023).

Indikator kesehatan anggota keluarga merupakan salah satu aspek dengan kondisi paling rendah. Sebanyak 90% responden berada pada kategori rendah dan hanya 10% pada kategori sedang. Kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Kusubibi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat rumah sakit atau puskesmas di desa sehingga masyarakat menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain keterbatasan persalinan di fasilitas kesehatan, imunisasi dasar, pemantauan pertumbuhan balita, serta pengobatan terhadap penyakit tertentu. Di sisi lain, sebagian keluarga telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memiliki jamban bersih.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan belum secara otomatis menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Ketersediaan fasilitas dan akses geografis menjadi faktor penting dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, rendahnya indikator kesehatan anggota keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat belum berada pada kategori tinggi. Hal ini sejalan dengan kerangka BPS yang menempatkan kesehatan sebagai salah satu dimensi utama kesejahteraan masyarakat (BPS, 2023).

Berbeda dengan kondisi kesehatan, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan berada pada kategori sedang untuk seluruh responden. Kondisi tersebut berkaitan dengan adanya kios atau toko kecil yang menyediakan obat-obatan untuk kebutuhan kesehatan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, ketersediaan obat-obatan dasar tidak sepenuhnya dapat menggantikan keberadaan fasilitas kesehatan formal. Dengan demikian, masyarakat masih memiliki akses terhadap kebutuhan kesehatan dasar, tetapi menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.

Indikator pendidikan menunjukkan kondisi yang berbeda. Seluruh responden atau 100% berada pada kategori tinggi dalam kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, biaya, jarak, dan prosedur penerimaan sekolah tidak menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam menyekolahkan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga mampu mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan pendidikan keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu aspek yang relatif mampu dipenuhi oleh masyarakat penambang. Kondisi ini penting karena pendidikan merupakan salah satu

dimensi kesejahteraan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dan peluang peningkatan kualitas kehidupan. Dalam kerangka BPS, pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat (BPS, 2023).

Pada indikator transportasi, kondisi masyarakat relatif lebih rendah. Sebanyak 77,1% responden berada pada kategori rendah, 15,7% kategori sedang, dan hanya 7,1% kategori tinggi. Rendahnya akses transportasi berkaitan dengan kondisi geografis Desa Kusubibi dan kondisi jalan menuju lokasi pertambangan. Sebagian masyarakat berjalan kaki menuju tempat kerja, sedangkan ketika musim hujan kondisi jalan menjadi berlumpur sehingga sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan melalui aktivitas pertambangan belum secara otomatis mengatasi hambatan infrastruktur dan aksesibilitas. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan memiliki keterbatasan infrastruktur jalan, transportasi menjadi faktor penting dalam mobilitas menuju tempat kerja dan memperoleh pelayanan dasar. Oleh karena itu, rendahnya akses transportasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Kusubibi.

Berdasarkan pengelompokan skor tingkat kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian, diperoleh 58 responden atau 82,8% berada pada kategori kesejahteraan sedang dan 12 responden atau 17,2% berada pada kategori kesejahteraan rendah. Tidak terdapat responden yang termasuk kategori kesejahteraan tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat penambang emas di Desa Kusubibi berada pada kategori kesejahteraan sedang berdasarkan sistem penskoran yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Penambang di Desa Kusubibi

Tingkat kesejahteraan	Jumlah	Persentase (%)
Tinggi	0	0
Sedang	58	82,8
Rendah	12	17,2
Total	70	100

Sumber: Data primer, 2023.

Dominannya kategori kesejahteraan sedang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi belum menghasilkan kondisi kesejahteraan yang tinggi pada seluruh aspek kehidupan. Aspek ekonomi relatif lebih baik karena sebagian besar responden memiliki pendapatan dan pengeluaran pada kategori sedang, sedangkan pendidikan anak menunjukkan kondisi yang sangat baik. Namun, kondisi kesehatan anggota keluarga, kualitas tempat tinggal, dan akses transportasi masih menunjukkan keterbatasan. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan pendapatan dari pertambangan tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan seluruh dimensi kesejahteraan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai pertambangan emas skala kecil di Indonesia yang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan dapat menjadi sumber penghidupan dan pendapatan masyarakat, tetapi manfaat ekonomi tersebut berjalan berdampingan dengan berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Junaidi (2022) juga menunjukkan bahwa pertambangan emas tanpa izin dapat memberikan manfaat ekonomi berupa kesempatan kerja dan pendapatan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Penelitian Aryansyah et al. (2023) mengenai pertambangan emas tradisional di Dompu

juga menunjukkan adanya manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, tetapi aktivitas pertambangan tetap memiliki konsekuensi terhadap lingkungan. Dengan demikian, hasil penelitian di Desa Kusubibi memperlihatkan bahwa pertambangan emas berperan sebagai sumber penghidupan masyarakat, tetapi peningkatan kesejahteraan memerlukan dukungan pada aspek kesehatan, kualitas tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat penambang emas di Desa Kusubibi memiliki tingkat kesejahteraan yang didominasi kategori sedang. Kondisi tersebut ditandai oleh pendapatan dan pengeluaran rumah tangga yang sebagian besar berada pada kategori sedang, kemampuan menyekolahkan anak yang relatif baik, tetapi masih terdapat keterbatasan pada kesehatan anggota keluarga, kualitas tempat tinggal, dan fasilitas transportasi. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat penambang tidak cukup dipahami dari peningkatan pendapatan akibat aktivitas pertambangan, tetapi perlu dilihat berdasarkan kemampuan rumah tangga memenuhi berbagai kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas kehidupannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat kesejahteraan masyarakat penambang emas di Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat penambang secara keseluruhan berada pada kategori sedang. Dari 70 responden, sebanyak 58 responden (82,8%) termasuk dalam kategori kesejahteraan sedang, sedangkan 12 responden (17,2%) termasuk dalam kategori kesejahteraan rendah dan tidak terdapat responden yang termasuk dalam kategori kesejahteraan tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktivitas

pertambangan emas telah menjadi salah satu sumber penghidupan penting bagi masyarakat, tetapi peningkatan pendapatan dari pertambangan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan seluruh aspek kesejahteraan rumah tangga.

Ditinjau berdasarkan indikator, kondisi pendapatan masyarakat didominasi kategori sedang (64,2%) dan konsumsi atau pengeluaran rumah tangga juga didominasi kategori sedang (57,1%). Kondisi tempat tinggal sebagian besar berada pada kategori sedang/semi permanen (90%), sedangkan fasilitas tempat tinggal didominasi kategori sedang (94,2%). Pada aspek kesehatan, 90% responden berada pada kategori rendah, meskipun kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan berada pada kategori sedang (100%). Sementara itu, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan menunjukkan kondisi tinggi pada seluruh responden (100%). Berbeda dengan pendidikan, kemudahan memperoleh fasilitas transportasi masih rendah, yaitu 77,1% responden berada pada kategori rendah. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan emas memberikan kontribusi terutama terhadap aspek ekonomi dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pendidikan, tetapi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan pada aspek kesehatan, kualitas tempat tinggal, dan akses transportasi. Sehingga, tingkat kesejahteraan masyarakat penambang di Desa Kusubibi perlu dipahami secara multidimensional dan tidak hanya berdasarkan besarnya pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryansyah, A., Halizah, N., Al Azhar, Y., Darusalam, B. S., Rahmawati, D., & Ariyanto, A. (2023). The impact of artisanal gold mining activities in Ranggo Village, Ladore Sub-District, Pajo District, Dompu Regency, West Nusa Tenggara. *Jurnal Pertambangan dan Lingkungan*, 4(2). <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JPL/article/view/20861>
- Astuti, W. F., Agusta, I., & Siwi, M. (2017). Dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin terhadap kesejahteraan rumah tangga gurandil. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 1(3), 317–338. <https://doi.org/10.29244/jskpm.1.3.317-338>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan. (2023). *Kecamatan Bacan Barat dalam Angka 2023*. Labuha: Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara 2023*. Ternate: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara.
- Junaidi. (2022). Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18988>
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Astuti, R. S., Agusta, I., & Siwi, V. N. (2016). Dampak aktivitas

- pertambangan emas tanpa izin terhadap kesejahteraan rumah tangga gurandil. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 2(1), 109–122. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.109-122>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator kesejahteraan rakyat 2023. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan. (2023). Kecamatan Bacan Barat dalam angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2022). Indikator kesejahteraan rakyat Provinsi Maluku Utara 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara.
- Junaidi. (2022). Dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merangin. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 14(2), 145–158.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021). Dirjen Minerba: Pertambangan tanpa izin melanggar konstitusi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Libassi, M. (2020). The social and environmental impacts of small-scale gold mining in Indonesia. World Resources Institute.
- Sihombing, R. A., et al. (2020). Kondisi sosial ekonomi masyarakat pada wilayah pertambangan emas skala kecil di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*.
- Sulaiman, A. A., et al. (2022). Small-scale gold mining and rural livelihoods in Indonesia. *Resources Policy*, 78, 102835.
- Taqiyaah, A., & Hidayat, R. (2023). Pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam perspektif hukum pertambangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*
- Flavor Conference, Rethymnon. Crete, Greece. Edited by George Charalambous. Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York-Tokyo